

## **PERAN AKTOR UTAMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN LITERATUR TENTANG RELASI PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**Regi Refian Garis**

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Korespondensi: [Regirefiangaris@unigal.ac.id](mailto:Regirefiangaris@unigal.ac.id)

### **ABSTRAK**

Peran aktor dalam kebijakan publik di tingkat lokal merupakan elemen kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi, dominasi, dan relasi antar aktor kebijakan publik di tingkat desa dengan menekankan pada peran pemerintah desa sebagai aktor utama serta interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis kajian empiris implementasi kebijakan pembangunan desa dan digitalisasi pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi dominan sebagai aktor politik-administratif, namun keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor dalam kerangka governance. Penelitian ini menawarkan model konseptual "Collaborative-Contextual Policy Actor Model" yang menekankan hubungan dinamis antara aktor utama, aktor pendukung, dan faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

**Kata kunci:** aktor kebijakan, governance, implementasi kebijakan, pemerintahan desa

### **ABSTRACT**

*The role of actors in public policy at the local level is a key element determining the effectiveness of policy implementation. This study aims to analyze the configuration, dominance, and relationships among public policy actors at the village level, emphasizing the role of the village government as the primary actor and its interactions with the community and the policy environment. The approach used is descriptive qualitative, with analysis based on empirical studies of the implementation of village development and tourism digitalization policies. The results indicate that the village government holds a dominant position as a political-administrative actor, but policy success is largely determined by the synergy between actors within a governance framework. This study offers a conceptual model called the "Collaborative-Contextual Policy Actor Model," which emphasizes the dynamic relationship between primary actors, supporting actors, and environmental factors in the implementation of public policy at the local level.*

**Keywords:** policy actors, governance, policy implementation, village government

#### **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan publik pada tingkat lokal merupakan arena yang paling konkret dalam memperlihatkan bagaimana

kebijakan beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Pada level ini, kebijakan tidak lagi sekadar berupa formulasi normatif atau dokumen administratif, melainkan hadir

dalam bentuk program, tindakan, dan interaksi sosial yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada tingkat lokal menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (1973), implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan dinamika, sehingga keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat menjadi locus yang strategis untuk memahami bagaimana kebijakan publik dijalankan dalam praktik.

Pada tingkat desa, kebijakan publik tidak hanya berhadapan dengan aspek teknokratis, tetapi juga dengan realitas sosial yang beragam, seperti nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan di tingkat lokal seringkali menunjukkan variasi yang signifikan, meskipun kebijakan yang diimplementasikan berasal dari sumber yang sama. Studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas aktor lokal dalam mengelola kebijakan tersebut (Hidayat et al., 2023). Dengan demikian, analisis kebijakan publik pada tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap aktor-aktor yang terlibat dan interaksi yang terjadi di antara mereka.

Dalam perspektif klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai

apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan dominasi pemerintah sebagai aktor utama dalam proses kebijakan. Pendekatan ini mencerminkan paradigma *state-centric* yang melihat kebijakan sebagai produk dari keputusan pemerintah, di mana masyarakat diposisikan sebagai objek kebijakan. Namun, perkembangan teori kebijakan publik menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas kebijakan dalam konteks modern.

Seiring dengan berkembangnya paradigma *governance*, kebijakan publik kini dipahami sebagai hasil interaksi antara berbagai aktor dalam suatu jaringan kebijakan. Rhodes (1996) menegaskan bahwa *governance* melibatkan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan bersifat jaringan (*network-based*), di mana setiap aktor memiliki peran dan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan. Pendekatan ini juga didukung oleh studi-studi empiris yang menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Wulandari et al., 2021).

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, perubahan paradigma dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi telah membawa implikasi yang signifikan terhadap peran aktor kebijakan. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek

pembangunan yang memiliki otonomi dalam merumuskan kebijakan berbasis potensi lokal. Dalam praktiknya, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, meskipun secara normatif terdapat dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan dominasi pemerintah desa dalam proses kebijakan. Hal ini terlihat dari peran pemerintah desa yang masih sangat kuat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, sementara partisipasi masyarakat seringkali masih bersifat terbatas. Studi yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa masih didominasi oleh aktor pemerintah, meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Fenomena dominasi aktor pemerintah ini tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi proses kebijakan di tingkat lokal. Secara struktural, pemerintah desa memiliki kewenangan formal yang memberikan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, secara kultural, hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih cenderung bersifat hierarkis, sehingga partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas masyarakat, baik dalam hal pengetahuan maupun akses terhadap informasi, juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi aktif dalam proses kebijakan.

Dalam konteks ini, peran aktor kebijakan publik di tingkat lokal menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Analisis terhadap aktor kebijakan tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki peran dominan, tetapi juga untuk memahami bagaimana interaksi antaraktor mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sabatier (1988), kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara berbagai aktor dalam suatu koalisi yang saling berkompetisi dan berkolaborasi untuk mempengaruhi kebijakan.

Selain itu, konsep *street-level bureaucracy* dari Lipsky (1980) juga memberikan perspektif penting dalam memahami peran aktor di tingkat lokal. Lipsky menegaskan bahwa aktor di tingkat lapangan memiliki diskresi yang besar dalam menentukan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pembuat kebijakan di tingkat atas, tetapi juga oleh pelaksana kebijakan di tingkat bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dalam perkembangan kebijakan publik kontemporer, partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam *governance*. Partisipasi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui keterlibatan berbagai perspektif. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat top-down (Laveda et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program pembangunan. Program-program seperti pengembangan pariwisata berbasis komunitas, digitalisasi desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk dapat berjalan secara efektif. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi, keberhasilan program digitalisasi pariwisata di desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas lokal dalam mengelola program tersebut.

Selain faktor aktor, lingkungan kebijakan juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan mencakup berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi proses kebijakan. Dalam konteks digitalisasi pariwisata, ketersediaan infrastruktur teknologi dan akses terhadap informasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program (Nurkholis & Adawiyah, 2024). Oleh karena itu, analisis kebijakan publik di tingkat lokal perlu mempertimbangkan tidak hanya aktor, tetapi juga konteks lingkungan yang mempengaruhi interaksi antaraktor.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik di tingkat lokal merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. Pemerintah desa sebagai aktor utama memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan, namun keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap peran aktor kebijakan publik di

tingkat lokal menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran aktor kebijakan publik di tingkat lokal dengan pendekatan teoritik dan empiris yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kebijakan publik, khususnya dalam memahami dinamika aktor dalam konteks governance lokal, serta memberikan implikasi praktis bagi peningkatan efektivitas kebijakan publik di tingkat desa melalui penguatan kolaborasi antaraktor.

## B. TINJAUAN TEORETIS

Dalam studi kebijakan publik, aktor kebijakan merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan kekuasaan dalam proses kebijakan. Menurut Sabatier (1988), aktor kebijakan terlibat dalam *advocacy coalition* yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi arah kebijakan. Sementara itu, R. A. W. Rhodes melalui konsep *network governance* menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor dalam jaringan yang saling bergantung.

Model implementasi kebijakan dari Smith (1973) memberikan kerangka analisis yang komprehensif dengan menempatkan empat variabel utama, yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Dalam model ini, aktor kebijakan tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga mencakup

masyarakat dan lingkungan sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan .

Lebih lanjut, konsep *street-level bureaucracy* dari Michael Lipsky menegaskan bahwa aktor di tingkat lapangan memiliki diskresi yang besar dalam menentukan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan integrasi teori tersebut, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang disebut sebagai Collaborative-Contextual Policy Actor Model, yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama, masyarakat sebagai aktor partisipatif, serta lingkungan sebagai faktor kontekstual yang mempengaruhi interaksi antaraktor.

Secara konseptual, model ini dapat dijelaskan sebagai hubungan dinamis antara tiga elemen utama. Pertama, pemerintah desa sebagai aktor inti yang memiliki kewenangan formal dalam kebijakan. Kedua, masyarakat sebagai aktor partisipatif yang berperan sebagai target sekaligus subjek kebijakan. Ketiga, lingkungan kebijakan yang mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis studi literatur dan data empiris dari penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa dan digitalisasi pariwisata . Analisis dilakukan dengan mengkaji peran aktor dalam kerangka teori implementasi kebijakan dan governance.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran aktor kebijakan publik di tingkat lokal pada dasarnya merefleksikan kompleksitas relasi kekuasaan, kapasitas, dan interaksi sosial yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan. Dalam konteks pembangunan desa, konfigurasi aktor tidak dapat dipahami secara linear, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang dinamis, di mana pemerintah desa, masyarakat, dan lingkungan kebijakan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kompleksitas ini menjadi semakin nyata ketika kebijakan yang diimplementasikan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta melibatkan berbagai kepentingan yang beragam. Dalam situasi demikian, kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga arena negosiasi sosial yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

Pemerintah desa dalam konteks ini menempati posisi strategis sebagai aktor utama kebijakan publik. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan formal yang dimilikinya, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan. Sebagai aktor utama, pemerintah desa memiliki kapasitas untuk menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembangunan desa berbasis digitalisasi pariwisata, peran ini menjadi semakin signifikan karena pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak inovasi yang mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan potensi lokal. Program-program seperti pelatihan digital, pengembangan sistem informasi wisata,

serta implementasi platform digital merupakan contoh konkret bagaimana pemerintah desa menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dominasi pemerintah desa dalam implementasi kebijakan merupakan fenomena yang sulit dihindari, mengingat struktur pemerintahan yang memberikan legitimasi formal kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan utama. Dalam perspektif klasik kebijakan publik, dominasi ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik. Namun, dalam konteks governance modern, dominasi aktor tunggal justru menjadi tantangan, karena kebijakan publik yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi. Dominasi pemerintah desa yang terlalu kuat berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi efektivitas kebijakan, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang inklusif.

Meskipun pemerintah desa memiliki peran dominan, keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran aktif dalam menentukan keberlanjutan kebijakan. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan, karena kebijakan yang tidak didukung oleh masyarakat cenderung tidak berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam

berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam musyawarah desa, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan.

Namun demikian, dalam praktiknya partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kapasitas masyarakat, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun akses terhadap informasi. Dalam konteks digitalisasi pariwisata, rendahnya literasi digital menjadi hambatan signifikan yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan akses terhadap sumber daya, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Robert Chambers yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tujuan kebijakan, tetapi juga menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain peran pemerintah dan masyarakat, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Lingkungan kebijakan mencakup

berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam konteks pembangunan desa berbasis digitalisasi pariwisata, faktor lingkungan teknologi menjadi sangat penting, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur digital dan akses internet. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, program digitalisasi tidak akan dapat berjalan secara optimal.

Lingkungan sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Nilai-nilai sosial, norma budaya, serta struktur sosial masyarakat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Dalam beberapa kasus, resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, terutama jika kebijakan yang diimplementasikan tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks lokal menjadi penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, diperlukan suatu model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara aktor kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat lokal. Model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan lingkungan kebijakan dalam bentuk segitiga interaktif. Model ini menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan formal, masyarakat sebagai aktor partisipatif yang berperan sebagai subjek dan objek kebijakan, serta lingkungan sebagai faktor kontekstual yang mempengaruhi interaksi antaraktor.

Dalam model ini, implementasi kebijakan berada di pusat interaksi antara ketiga aktor tersebut. Implementasi kebijakan tidak lagi dipandang sebagai proses linear yang dimulai dari perumusan hingga evaluasi, tetapi sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi terus-menerus antara aktor. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat bersifat dua arah, di mana pemerintah tidak hanya mengarahkan kebijakan, tetapi juga menerima masukan dari masyarakat. Demikian pula, masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga berperan dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Faktor lingkungan dalam model ini berfungsi sebagai variabel kontekstual yang mempengaruhi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Lingkungan dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas kebijakan, tergantung pada kondisi yang ada. Misalnya, lingkungan yang mendukung inovasi teknologi akan mempercepat implementasi kebijakan digitalisasi, sementara lingkungan yang kurang mendukung akan menjadi hambatan.

Model konseptual ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di tingkat lokal tidak dapat ditentukan oleh satu aktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara berbagai aktor dalam konteks tertentu. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam mencapai tujuan kebijakan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peran aktor kebijakan publik di tingkat lokal mengalami pergeseran dari pola dominasi pemerintah menuju pola

kolaboratif. Pergeseran ini merupakan bagian dari perubahan paradigma governance yang menekankan pentingnya partisipasi dan kolaborasi dalam proses kebijakan. Namun, dalam praktiknya, transisi menuju model kolaboratif masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi pemerintah desa masih cukup kuat, terutama dalam aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam perspektif governance, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju tata kelola kolaboratif masih dalam tahap perkembangan. Diperlukan upaya yang sistematis untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam proses kebijakan. Selain itu, pemerintah desa perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat, misalnya melalui mekanisme partisipatif yang lebih terbuka dan transparan.

Penguatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong partisipasi yang lebih aktif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan, serta peningkatan akses terhadap informasi. Dalam konteks digitalisasi pariwisata, peningkatan literasi digital menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam program pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah desa juga perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan sistem koordinasi, serta pengembangan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai aktor dominan, tetapi juga

sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dengan mengembangkan model konseptual yang mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan dan governance. Model ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik di tingkat lokal ditentukan oleh interaksi antara aktor dan konteks, bukan hanya oleh kapasitas aktor tunggal. Dengan demikian, analisis kebijakan publik perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek struktural, tetapi juga aspek relasional yang mencerminkan interaksi antaraktor.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa peran aktor kebijakan publik di tingkat lokal merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Pemerintah desa sebagai aktor utama memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan, tetapi keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai aktor menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan publik di tingkat lokal.

## E. KESIMPULAN

Peran aktor kebijakan publik di tingkat lokal menunjukkan bahwa pemerintah desa merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan. Namun, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan kebijakan. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dalam proses kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan publik di tingkat lokal.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, M. H. D., Amran, K., & Saguni, D. S. (2023). Collaborative process: Trust building indicator dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 261–275. <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/view/179>
- Laveda, A. T., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2024). Pendekatan community based disaster management (CBDM) melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 7(1), 25–34. <https://ejournalfia.unkris.ac.id/index.php/pandita/article/view/138>
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Nurkholis, M., & Adawiyah, A. (2024). Rancang bangun sistem informasi e-tiket dan paket wisata dengan menerapkan metode electronic customer relationship management (ECRM). *JINTEKS*, 6. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/JINTEKS/article/view/4203>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>
- Wulandari, N. A., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2021). Akselerasi pengembangan destinasi wisata Danau Toba (Studi realisasi prinsip good governance pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba). *Jurnal MODERAT*, 7(3), 512–533. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2484>
- Garis, R. R. (2025). Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1561–1571. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Garis, R. R., Nursetiawan, I., Sidiq, M., Sultan, M., Rengganis, N. D., Andriani, S. N., Aprilia, I. A., Syaori, G. R., & Nurdiana, D. (2025). Peningkatan kompetensi digital dan kepariwisataan kelompok sadar wisata melalui virtual office framework berbasis sustainable tourism di Desa Tanjungsari. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(4). <https://dmi-journals.org/jai/>